



**Laporan Kinerja Triwulan 2
Balai Bahasa Jawa Timur
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Bahasa Jawa Timur selama triwulan 2 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik				
[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	64	Persen	0	0
[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	19	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia				
[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	41	Persen	0	0
[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	60	Persen	0	0
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan				
[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	59,93	Persen	0	0
[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya	50	Persen	0	0
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra				
[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	11,55	Persen	0	0
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra				
[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	2,8	Persen	0	0
[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	1:18	Rasio	0	0
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA				



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	50	Persen	0	0
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Jawa Timur				
[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Jawa Timur	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Jawa Timur minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

Progress/Kegiatan

Pada triwulan II, indikator kinerja kegiatan (IKK) Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program masih menunggu terbitnya petunjuk teknis (juknis) sebagai acuan resmi. Ketiadaan juknis membuat kegiatan belum dapat dijalankan, mengingat juknis memegang peranan penting dalam memberikan arahan mengenai mekanisme, sasaran, serta tata cara pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, BBP Jatim memilih untuk menunda kegiatan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai prosedur, tepat sasaran, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Setelah juknis diterbitkan, kegiatan akan segera dilaksanakan secara terencana untuk mendukung pencapaian target peningkatan kualitas literasi membaca peserta didik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan (IKK) Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca pada triwulan II belum dapat dilakukan karena petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program belum diterbitkan. Ketiadaan juknis tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan langkah operasional, penetapan sasaran peserta, serta mekanisme kegiatan, sehingga pelaksanaan harus ditunda hingga juknis tersedia.

Strategi/Tindak Lanjut

- **Koordinasi Intensif dengan Pusat**

Melakukan komunikasi aktif dengan unit pusat terkait agar proses penerbitan juknis dapat dipercepat atau setidaknya diperoleh draft sementara sebagai acuan persiapan kegiatan.

- **Penyusunan Rencana Awal**

Menyusun rancangan kegiatan awal yang fleksibel berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, agar ketika juknis terbit, kegiatan dapat segera dijalankan tanpa harus memulai dari awal.

- **Identifikasi Sasaran dan Mitra**

Melakukan pemetaan peserta didik, sekolah, dan mitra pelaksana yang akan terlibat dalam program literasi sehingga pelaksanaan bisa lebih cepat saat juknis sudah tersedia.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- **Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana**

Memberikan orientasi awal kepada tim teknis terkait mekanisme pelaksanaan program literasi, sehingga siap melaksanakan kegiatan segera setelah juknis diterbitkan.

- **Monitoring dan Evaluasi Awal**

Menyiapkan instrumen monitoring serta indikator capaian sejak dini, agar pelaksanaan kegiatan setelah juknis terbit bisa langsung diawasi dan dievaluasi secara terukur

[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Progress/Kegiatan

Hingga triwulan ke-2 telah dilakukan beberapa hal berikut.

1. Penelaahan naskah telah dilakukan dari Mei dan dilaksanakan secara daring oleh dua narasumber. Kemudian, naskah direvisi oleh penulis.
2. Penandatanganan kontrak dengan penulis.
3. Naskah yang telah direvisi, kemudian diperiksa oleh tim.
4. Naskah ditambah sebanyak 107 naskah.
5. Tahap kedua saat ini, masih seleksi penulis dan dilanjutkan dengan seleksi penerjemah.
6. Finalisasi naskah tahap dua dan proses penerjemahan membutuhkan waktu sekitar 10 hari
7. Ditargetkan pada bulan Agustus, ilustrasi untuk 37 naskah sudah selesai.
8. Akhir Agustus atau awal September $\frac{2}{3}$ naskah sudah selesai sehingga sudah bisa didaftarkan ISBN.
9. Finalisasi seluruhnya pada November.
10. Dari 40 ilustrator, 16 ilustrator akan mengerjakan tahap satu.
11. Ilustrator akan dibayar setelah menyelesaikan per satu buku. Diproyeksikan ada tiga buku per satu ilustrator.

Kendala/Permasalahan

Hingga saat ini tidak terdapat kendala teknis yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, terdapat potensi permasalahan terkait waktu, khususnya risiko keterlambatan dalam proses finalisasi. Hal ini disebabkan karena tahapan seleksi tahap II baru dapat dimulai pada akhir semester I, sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi ketepatan jadwal yang telah ditetapkan

Strategi/Tindak Lanjut

- Untuk mempercepat proses kerja dan menjaga ketepatan waktu penyelesaian naskah, distribusi ilustrator akan diatur ulang. Sebagian ilustrator dapat langsung mengerjakan naskah tahap pertama, sehingga proses ilustrasi tidak menunggu seluruh naskah selesai. Di sisi lain, seleksi penulis dan penerjemah tahap dua dipercepat dengan tetap menekankan kualitas hasil, guna menghindari potensi keterlambatan pada tahap finalisasi.
- Target penyelesaian dua pertiga naskah pada akhir Agustus dijadikan prioritas utama, agar proses pengurusan ISBN dapat dilakukan tepat waktu tanpa hambatan. Untuk mendukung hal ini, koordinasi lintas tim—baik editor, ilustrator, maupun penerjemah—akan diperkuat secara rutin agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun.
- Aspek administratif juga menjadi perhatian, khususnya terkait pembayaran ilustrator. Mekanisme pembayaran per buku dipastikan berjalan sesuai kesepakatan, dengan dilengkapi dokumentasi kerja yang lengkap dan transparan. Sebagai langkah preventif, antisipasi terhadap potensi keterlambatan dilakukan sejak dini meskipun hingga saat ini tidak ada kendala teknis yang berarti. Dengan strategi ini, diharapkan seluruh tahapan dapat terlaksana secara efisien dan terkontrol sesuai jadwal.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[SK 2] Meningkatkan Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia

[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya

Progress/Kegiatan

Pada triwulan ke-2 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Koordinasi Pelaksanaan UKBI di Kota dan Kabupaten Malang, tanggal 14—15 April 2025
2. Koordinasi Pelaksanaan UKBI di Kabupaten Gresik, tanggal 16 April 2025.
3. Koordinasi Pelaksanaan UKBI di Kabupaten Sidoarjo, tanggal 17 April 2025.
4. Sosialisasi UKBI Adaptif di Kota Malang, tanggal 21 April.
5. Pendampingan dan Pelaksanaan UKBI bagi Pemangku Kepentingan di Kabupaten Malang, tanggal 22—23 April 2025.
6. Sosialisasi UKBI Adaptif di Kabupaten Gresik, tanggal 24 April 2025.
7. Koordinasi Pelaksanaan UKBI di Madiun, tanggal 28—29 April 2025.
8. Pendampingan dan Pelaksanaan UKBI bagi Pemangku Kepentingan di Kabupaten Sidoarjo, tanggal 26 Mei 2025.

Sementara itu, terkait peserta UKBI, pada Maret dan April, terdapat sebanyak 5.434 peserta. Kemudian pada Mei dan Juni, ada sebanyak 9.744 peserta sehingga total untuk tahun ini sekitar 15.178 peserta. Meskipun intensitas komunikasi dengan calon peserta belum optimal karena masih terfokus pada pelaksanaan kegiatan di lapangan, setiap kelompok peserta sosialisasi telah difasilitasi dengan grup komunikasi. Grup ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi lanjutan mengenai proses pendaftaran UKBI, baik secara mandiri maupun kolektif. Berdasarkan hasil evaluasi sementara, pendaftaran secara kolektif dinilai lebih efektif dalam menjaring peserta. Namun demikian, respons peserta terhadap kegiatan ini cukup beragam; sebagian menunjukkan antusiasme tinggi, sementara yang lain cenderung pasif. Untuk mengatasi tindak lanjut yang lambat oleh instansi pendidikan, tim kerja UKBI telah membuat surat kepada kepala Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait untuk segera menindaklanjuti kegiatan Sosialisasi UKBI dengan harapan Kepala Dinas akan membuat nota dinas untuk semua sekolah agar melaksanakan UKBI untuk siswanya

Kendala/Permasalahan

Pada triwulan II, pelaksanaan kegiatan UKBI telah berjalan sesuai rencana, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian. Pertama, intensitas komunikasi dengan calon peserta belum optimal karena fokus tim lebih banyak tercurah pada penyelenggaraan kegiatan di lapangan. Hal ini berdampak pada keterbatasan tindak lanjut informasi secara cepat dan menyeluruh.

Kedua, meskipun telah difasilitasi dengan grup komunikasi, respons peserta terhadap sosialisasi UKBI masih beragam. Sebagian peserta menunjukkan antusiasme tinggi, namun sebagian lainnya cenderung pasif, sehingga memengaruhi kelancaran proses pendaftaran.

Ketiga, proses tindak lanjut oleh instansi pendidikan dinilai masih lambat. Meski surat permohonan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, koordinasi lebih lanjut ke sekolah-sekolah masih belum merata. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian target jumlah peserta UKBI sesuai yang diharapkan.

Dari delapan daerah yang telah melaksanakan UKBI, capaian pelaksanaan masih belum merata. Hingga saat ini, hanya Kota Mojokerto pada tingkat SMP yang berhasil melaksanakan UKBI secara menyeluruh. Sementara itu, pada tingkat SMA, pelaksanaan masih belum merata dan belum menjangkau seluruh sekolah. Di daerah lain seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, kegiatan UKBI memang sudah berjalan, namun jumlah pesertanya masih terbatas dan belum sebanyak di Mojokerto. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya intensif untuk mendorong pemerataan pelaksanaan UKBI di semua jenjang dan wilayah.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Penguatan Komunikasi dengan Calon Peserta

- Membentuk tim khusus yang berfokus pada komunikasi daring dengan calon peserta, terpisah dari tim lapangan.
- Memaksimalkan penggunaan media sosial, laman resmi, dan pesan singkat terjadwal untuk menyampaikan informasi pendaftaran secara cepat dan menyeluruh.

Optimalisasi Grup Komunikasi Peserta

- Menugaskan admin pendamping di setiap grup komunikasi agar interaksi lebih aktif.
- Menyediakan konten pengingat, tanya jawab interaktif, serta informasi motivatif agar peserta lebih responsif dan tidak pasif.

Percepatan Tindak Lanjut Instansi Pendidikan

- Melakukan koordinasi intensif dengan Kepala Dinas Pendidikan melalui forum rutin dan laporan perkembangan.
- Memberikan batas waktu tindak lanjut yang jelas, disertai monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan instruksi sampai ke sekolah.
- Melibatkan Cabang Dinas serta pengawas sekolah sebagai perpanjangan tangan dalam mendorong pelaksanaan UKBI.

Pemerataan Pelaksanaan di Seluruh Daerah

- Menjadikan keberhasilan Mojokerto sebagai model praktik baik (best practice) yang dapat direplikasi di daerah lain.
- Menyusun target capaian bertahap untuk jenjang SMP dan SMA di setiap daerah, dengan indikator yang terukur.
- Melakukan sosialisasi tambahan di daerah yang capaian pesertanya masih rendah, seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan lokal.

Penguatan Monitoring dan Evaluasi

- Menyusun laporan perkembangan per daerah secara bulanan sebagai bahan evaluasi kinerja.
- Menggunakan data capaian peserta untuk menetapkan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran.

[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia

[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Progress/Kegiatan

Peningkatan Kompetensi Berbahasa Indonesia (daring)

Pada triwulan ke dua telah dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Sastra bagi Guru SMP, tanggal 15—17 April 2025 dengan peserta 70 orang guru SMP bidang studi Sastra Indonesia di wilayah Mojokerto. Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Kegiatan berlangsung lancar tanpa ada kendala. Lalu, berkaitan dengan pelaksanaan PKBI II, pihak dinas pendidikan terkait sudah dihubungi untuk membantu pendataan peserta dari guru nonbahasa. Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan di Aula Kabupaten Trenggalek dengan sistem sewa (ada biaya sewa).

Bengkel Musikalisasi Puisi

Pada triwulan ke-2, telah dilaksanakan Bengkel Musikalisasi Puisi pada tanggal 14 Juni 2025 secara daring. Peserta terdiri atas 68 siswa dan guru pendamping. Yang aktif dalam ruang zoom adalah para pelatih, sedangkan siswa lebih banyak pasif dan keluar masuk ruang zoom. Kegiatan ini diisi oleh dua narasumber pemateri yang merupakan pelatih tim pemenang 1 dan 2 dalam seleksi musikalisasi puisi tahun 2024. narasumber pertama adalah Galih Tunggal Sasmito (Pepi) yang membawakan materi tentang interpretasi



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

puisi. Menurutnya, peserta harus mampu untuk menganalisis puisi sehingga dapat menemukan cara bagaimana puisi bisa ditampilkan dengan indah. Narasumber kedua adalah Juni yang membawakan materi instrumen aransemen puisi. Menurutnya, salah satu tantangan sekaligus keunikan dalam musikalisasi puisi adalah menemukan elemen melodi yang khas, yang tidak hanya indah, tapi juga mampu menjadi identitas dari aransemen tersebut. Berkaitan dengan persiapan festival musikalisasi puisi, pendaftaran sudah dibuka sejak 10 Mei 2025. Pelaksanaan festival direncanakan akan dilaksanakan di Aula Cut Nyak Dien. Tim kerja sudah berkoordinasi dengan Tim Sarpras dan Rumah Tangga untuk mendata beban listrik di semua gedung untuk mengantisipasi beban listrik yang terlalu tinggi akibat sound system pada saat pelaksanaan festival. Sementara itu, berkaitan dengan penyewaan kabel untuk sound system, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut.

Pemilihan Duta Bahasa

Pada triwulan ke dua telah dilaksanakan kegiatan berikut.

1. Pengumuman Lolos Seleksi Administrasi - Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jawa Timur, tanggal 10 April 2025.
2. Pembekalan Awal Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jawa Timur, tanggal 11 April 2025.
3. Seleksi Awal Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jawa Timur, 12—23 April 2025.
4. Karantina dan Puncak Pemilihan Duta Bahasa Jawa Timur, tanggal 3—4 Mei 2025.

Kendala/Permasalahan

1. Kegiatan Bengkel Musikalisasi Puisi dilaksanakan secara daring melalui zoom sehingga kurang efektif untuk kegiatan tersebut yang seharusnya lebih banyak praktik.
2. Berkaitan dengan peserta festival musikalisasi puisi, hingga 30 Juni 2025 belum ada pendaftar karena pada formulir pendaftaran juga disertakan kolom tautan unggahan YouTube. Biasanya, peserta mengumpulkan karyanya melalui unggahan pada dua hari sebelum penutupan pendaftaran.

Strategi/Tindak Lanjut

Optimalisasi Bengkel Musikalisasi Puisi Daring

- Menyisipkan sesi praktik langsung dengan metode breakout room agar peserta dapat berlatih dalam kelompok kecil dengan pendampingan fasilitator.
- Menyediakan materi praktik berupa contoh aransemen sederhana, instrumen pendukung, dan panduan teknis yang bisa dipelajari peserta secara mandiri sebelum dan sesudah sesi daring.
- Menggunakan pendekatan blended learning, yaitu menggabungkan sesi daring dengan pengiriman rekaman praktik peserta yang kemudian mendapatkan umpan balik dari narasumber.

Meningkatkan Efektivitas Pendaftaran Festival

- Menyusun timeline komunikasi yang lebih intensif sejak awal pembukaan pendaftaran, dengan pengingat berkala melalui media sosial, grup WhatsApp, dan surat resmi ke sekolah.
- Menyediakan tutorial singkat cara mengunggah karya ke YouTube agar peserta tidak merasa kesulitan.
- Membuka opsi pengumpulan karya secara bertahap (misalnya tautan sementara atau draft unggahan) agar peserta terdorong untuk mendaftar lebih awal.

Strategi Mengantisipasi Pola Pendaftaran di Akhir Waktu

- Menetapkan *checkpoint* pendaftaran, misalnya laporan mingguan jumlah calon pendaftar, agar panitia dapat melakukan intervensi cepat jika jumlah masih rendah.
- Memberikan insentif atau keistimewaan (misalnya kesempatan *coaching clinic* tambahan) bagi peserta yang mendaftar lebih awal.
- Menyebarkan testimoni atau cuplikan karya peserta tahun sebelumnya untuk menumbuhkan motivasi dan semangat kompetisi.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

Progress/Kegiatan

Pada triwulan ke-2, telah dilaksanakan beberapa kegiatan berikut.

1. Audiensi Pengutamaan Bahasa Negara, tanggal 10 April 2025.
2. Pengambilan Data Pengutamaan Bahasa Negara bagi Lembaga Terbina, tanggal 22— 24 April 2025.
3. Audiensi Pengutamaan Bahasa Negara, tanggal 8 Mei 2025
4. Pengambilan Data Pengutamaan Bahasa Negara bagi Lembaga Terbina, tanggal 19— 23 Mei 2025.
5. Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Tata Naskah Dinas, tanggal 18—19 Juni 2025.

Kegiatan Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara di Lanskap dan Dokumen Lembaga telah dilaksanakan di Block Office Kota Malang pada 19 Juni 2025. kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 50 lembaga dan 5 undangan dari PHRI kota dan kabupaten Malang dan Batu. Narasumber yang hadir adalah Ketua DPRD Kota Malang. Kegiatan ini juga diisi oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Antusiasme dan respons peserta baik. Sebanyak 50% peserta yang hadir dari lembaga swasta adalah manajer umum.

Kendala/Permasalahan

1. Kegiatan Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara di Lanskap dan Dokumen Lembaga mengalami kesulitan pada pengumpulan data karena waktunya terlalu singkat. Seluruh 50 lembaga harus terkumpul selama delapan hari. Idealnya, pengumpulan data per harinya maksimal 4 lembaga saja.
2. Undangan untuk para pejabat masih terlalu mendadak, alangkah baiknya dibagikan jauh-jauh hari.
3. Jadwal kegiatan masih mendadak, baru muncul di awal bulan sehingga sulit untuk berkoordinasi dengan pihak terkait di daerah.

Strategi/Tindak Lanjut

Manajemen Waktu dan Target Pengumpulan Data

- Menyusun jadwal pengumpulan data yang lebih realistis dengan menetapkan batas maksimal empat lembaga per hari.
- Membagi tim kerja menjadi beberapa kelompok agar pengumpulan data dapat dilakukan secara paralel.
- Menyiapkan format isian standar untuk mempercepat proses pengumpulan dan meminimalkan pengulangan informasi.

Perencanaan Undangan Pejabat

- Mengirimkan undangan kegiatan minimal dua minggu sebelum pelaksanaan, sehingga pejabat terkait dapat menyesuaikan jadwal.
- Menyertakan jadwal sementara (draft agenda) sejak awal agar penerima undangan sudah memiliki gambaran kegiatan meskipun detailnya masih bisa diperbarui.

Penetapan Jadwal Kegiatan yang Lebih Awal

- Menetapkan kalender kegiatan bulanan atau triwulanan agar pihak terkait di daerah dapat menyiapkan waktu dan sumber daya lebih baik.
- Membuat sistem koordinasi lebih awal dengan pemerintah daerah, termasuk melalui surat pemberitahuan awal sebelum undangan resmi dikirimkan.
- Melakukan rapat persiapan internal jauh hari sebelumnya sehingga saat jadwal resmi ditetapkan, koordinasi dengan pihak eksternal dapat langsung dijalankan.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya

Progress/Kegiatan

Pada triwulan ke-2, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Bimtek Sidoarjo, 22–26 Mei 2025 di SMK 1 Buduran diisi oleh 3 narasumber dan melibatkan Dinas Pariwisata dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu narasumbernya. Peserta bimtek ada 30 orang dari 15 komunitas.
2. Pendampingan komunitas literasi di Lamongan yang diikuti 12 komunitas. Dilaksanakan di Taman Baca Cinta Cita, tanggal 16–17 Juni 2025.

Pada kegiatan pendampingan komunitas literasi, hari pertama para peserta mendapatkan materi mengenai manajemen literasi yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola komunitas masing-masing. Sementara itu, pada hari kedua, peserta difasilitasi untuk menyusun program kerja dan merancang pengembangan komunitas literasi yang berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi praktik baik antar komunitas, sehingga masing-masing peserta dapat saling bertukar pengalaman, strategi, dan inovasi dalam mengelola kegiatan literasi di wilayahnya. Kolaborasi dan interaksi yang terjalin diharapkan dapat memperkuat jejaring serta meningkatkan kualitas pengelolaan komunitas literasi di masa mendatang.

Kendala/Permasalahan

1. Tempat pelaksanaan kecil dan sarana prasarannya kurang.
2. Tempat pelaksanaan cukup jauh dari lokasi masing-masing komunitas literasi.
3. Masukan dari peserta, waktu kegiatan terlalu lama (7 jam).

Strategi/Tindak Lanjut

Optimalisasi Tempat dan Sarana Prasarana

- Melakukan pemetaan lokasi alternatif dengan kapasitas lebih besar dan fasilitas memadai untuk kegiatan serupa ke depan.
- Menyediakan sarana pendukung tambahan (sound system, kursi, meja, pendingin ruangan, dan perlengkapan lainnya) melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau pinjaman dari lembaga mitra.
- Menyiapkan rencana cadangan apabila lokasi utama tidak mencukupi.

Pemilihan Lokasi yang Lebih Strategis

- Menentukan lokasi pelaksanaan di titik tengah atau wilayah yang mudah dijangkau oleh sebagian besar komunitas literasi.
- Memanfaatkan gedung pemerintah daerah, sekolah, atau balai pertemuan yang lebih dekat dengan komunitas sasaran.
- Jika memungkinkan, melaksanakan kegiatan secara bergilir di beberapa daerah agar lebih merata dan aksesibel.

Penyesuaian Durasi Waktu Kegiatan

- Membagi kegiatan panjang menjadi dua sesi (misalnya dua hari) agar peserta tidak kelelahan.
- Menyusun agenda dengan porsi praktik dan diskusi yang lebih interaktif, sehingga kegiatan tetap produktif meski waktu lebih singkat.
- Menyediakan jeda istirahat yang cukup agar peserta tetap fokus selama kegiatan berlangsung.

[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Progress/Kegiatan

Pada triwulan ke-2 dilaksanakan kegiatan berikut.

1. Pencarian Data Kamus di Bangkalan, tanggal 22—25 April 2025.
2. Pencarian Data Kamus di Pamekasan tanggal 20—23 Mei 2025.
3. Pengambilan data di Bondowoso 17–20 Juni dengan 3 orang narasumber.
4. Lokakarya rencana akan dilaksanakan pada 22–24 Juli dan rencananya diundur di akhir bulan, namun perlu melaporkan pada Pimpinan.

Kendala/Permasalahan

Pelaksanaan pengambilan data di Bondowoso mengalami kendala akibat adanya buka blokir anggaran yang menyebabkan lokasi pengambilan data bertambah. Namun, hasil yang diperoleh kurang optimal karena wilayah Bondowoso relatif minim potensi yang menonjol untuk digali lebih jauh. Selain itu, proses pengumpulan informasi juga terhambat karena salah satu narasumber tidak dapat berbahasa Indonesia sama sekali, sehingga terjadi kesulitan dalam memahami penjelasan yang disampaikan.

Strategi/Tindak Lanjut

Optimalisasi Potensi Lokal

1. Meskipun Bondowoso dinilai minim potensi menonjol, tim dapat menggali aspek khas yang ada, seperti tradisi lokal, kearifan masyarakat, atau potensi kecil yang unik namun belum terekspos.
2. Melibatkan tokoh masyarakat atau lembaga setempat agar dapat menunjukkan sisi lain yang bisa menjadi nilai tambah.

Manajemen Anggaran dan Lokasi

1. Dengan adanya tambahan lokasi akibat buka blokir anggaran, perlu dilakukan prioritas dan fokus pada data yang relevan serta berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap laporan.
2. Evaluasi pemanfaatan anggaran agar tetap efisien meskipun titik lokasi bertambah.

Mengatasi Kendala Bahasa Narasumber

1. Menyediakan penerjemah lokal atau melibatkan pendamping dari masyarakat sekitar yang mampu menjembatani bahasa.
2. Menyusun pertanyaan lebih sederhana dengan bantuan bahasa tubuh, gambar, atau media lain agar komunikasi tetap berjalan.
3. Mendokumentasikan penjelasan narasumber secara detail untuk kemudian diterjemahkan lebih lanjut.

[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Progress/Kegiatan

Pada bulan Juni, Pusat Pengembangan dan Pelindungan (Pusbanglin) melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) pemetaan bahasa yang diperuntukkan bagi para pegawai calon pelaksana pemetaan bahasa dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kegiatan bimtek tersebut sepenuhnya dibiayai oleh Pusbanglin sehingga peserta dapat mengikuti kegiatan dengan maksimal. Setelah bimtek selesai, hasil yang diperoleh tidak berhenti pada peserta saja, melainkan langsung diimbaskan kepada seluruh pegawai melalui kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

berbagi pengetahuan dan pendampingan teknis. Dengan adanya alur tersebut, diharapkan seluruh pegawai memiliki pemahaman dan keterampilan yang sama, sehingga pelaksanaan pengambilan data pemetaan bahasa dapat dilakukan secara serentak dan terstruktur pada bulan Juli mendatang.

Kendala/Permasalahan

Perencanaan kegiatan pengambilan data di wilayah Masalembu tidak dapat disusun secara pasti sejak awal karena keterbatasan informasi terkait akses transportasi. Salah satu kendala utama adalah tidak tersedianya jadwal keberangkatan kapal dari Surabaya menuju Masalembu yang terpublikasi secara jelas dan teratur. Ketidakpastian jadwal ini menyulitkan tim dalam menentukan waktu keberangkatan dan kepulangan dengan tepat. Akibatnya, perhitungan jumlah hari yang dibutuhkan selama perjalanan, termasuk lama tinggal di lokasi, menjadi tidak pasti. Kondisi ini secara langsung berpengaruh terhadap alokasi biaya yang harus disiapkan, terutama untuk menanggung kebutuhan pulang-pergi dan akomodasi tim selama berada di lapangan. Dengan demikian, keterbatasan informasi transportasi ini menjadi hambatan penting yang berdampak pada efisiensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengambilan data di Masalembu.

Strategi/Tindak Lanjut

Koordinasi dengan Pihak Transportasi

1. Menjalin komunikasi langsung dengan pihak penyedia kapal atau agen transportasi laut untuk memperoleh informasi terkini mengenai jadwal keberangkatan dan kepulangan.
2. Meminta jadwal sementara atau perkiraan keberangkatan secara berkala agar tim bisa menyusun rencana cadangan.

Membangun Jejaring dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Lokal

1. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat setempat, atau tokoh masyarakat di Masalembu untuk memperoleh informasi terbaru mengenai akses transportasi maupun kondisi lapangan.
2. Melibatkan kontak lokal sebagai penghubung sehingga tim tidak bergantung pada informasi umum yang sulit diakses.

Penyusunan Rencana Fleksibel

1. Menyusun beberapa alternatif jadwal keberangkatan dan kepulangan agar kegiatan tidak sepenuhnya terhambat jika terjadi perubahan mendadak.
2. Menyiapkan skenario tambahan terkait kebutuhan biaya akomodasi dan transportasi untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan kapal.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Digital

1. Memanfaatkan platform digital, media sosial, atau grup komunikasi masyarakat pelayaran yang seringkali memberikan update cepat terkait jadwal kapal dan kondisi cuaca.
2. Menggunakan sistem monitoring prakiraan cuaca untuk memperkirakan potensi keterlambatan keberangkatan kapal.

[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Progress/Kegiatan

Pada triwulan ke-2 dilaksanakan kegiatan berikut.

1. DKT Penyusunan Modul Bahan Ajar Bahasa Madura dan Bahasa Jawa Dialek Using secara daring,



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

tanggal 22 April 2025.

2. Bimtek Guru Master Bahasa Madura (Wilayah Bondowoso), tanggal 4—9 Mei 2025.
3. Bimtek Guru Master Bahasa Madura (Wilayah Situbondo), tanggal 5—10 Mei 2025.
4. Audiensi Revitalisasi Bahasa Jawa di Kabupaten Gresik, 14 Mei 2025.
5. Audiensi Revitalisasi Bahasa Jawa di Kabupaten Sidoarjo, tanggal 15 Mei 2025.
6. Audiensi Revitalisasi Bahasa Jawa di Kota Surabaya, tanggal 16 Mei 2025.
7. Bimtek Guru Master Bahasa Madura (Wilayah Kepulauan Madura), tanggal 19—23 Mei 2025.
8. Bimtek Bahasa Jawa dialek Using, tanggal 15—20 Juni 2025
9. Rapat Koordinasi Antarinstansi dalam Rangka Revitalisasi Bahasa Jawa 23 Juni 2025
10. DKT Pembuatan Modul Ajar Bahasa Jawa dalam Rangka Revitalisasi Bahasa Jawa 24—26 Juni 2025.
11. Tim Kerja Linmod akan melaksanakan pemetaan bahasa dan sastra beserta tim kerja yang lain. Saat ini masih menunggu lokus untuk pemetaan bahasa dan sastra.

Kendala/Permasalahan

1. Maestro bahasa Madura perlu dievaluasi, misalnya maestro puisi sangat teoretis, kurang praktik, narsum menembang terlalu banyak tembang yang disampaikan sehingga peserta kurang fokus, narsum mendongeng terlalu teatrikal, fokus di seni panggung sedangkan substansi dongeng kurang.
2. Saat mengundang Pemerintah Daerah (Kepala Dinas, dsb.), waktunya terlalu dekat, yaitu tiga hari.
3. Jadwal kegiatan terlalu mepet sehingga pelaksanaan masih tergopoh-gopoh.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Maestro Bahasa Madura

- Menyusun format evaluasi terstruktur terhadap setiap maestro/narasumber dengan menekankan keseimbangan antara teori dan praktik agar penyampaian materi lebih aplikatif.
- Memberikan arahan dan batasan waktu penyajian materi kepada narasumber, misalnya jumlah tembang yang relevan, agar peserta tetap fokus.
- Untuk narasumber mendongeng, arahkan agar lebih menekankan substansi cerita, bukan hanya aspek pertunjukan panggung, sehingga pesan bahasa dan budaya dapat tersampaikan dengan baik.
- Melakukan briefing atau gladi bersih singkat sebelum acara untuk menyamakan persepsi antara panitia dan narasumber.

2. Pengelolaan Undangan Pemerintah Daerah

- Menyusun daftar undangan prioritas dan mengirimkannya lebih awal, minimal 2–3 minggu sebelum kegiatan, agar pihak pemerintah daerah dapat menyesuaikan jadwal.
- Menyiapkan undangan cadangan berupa pejabat yang relevan jika undangan utama berhalangan hadir.
- Memanfaatkan komunikasi informal (misalnya melalui staf atau ajudan) untuk memastikan kehadiran.

3. Manajemen Waktu Kegiatan

- Membuat timeline kegiatan lebih longgar dengan menambah buffer waktu antara sesi sehingga pelaksanaan tidak terkesan tergesa-gesa.
- Menyusun *rundown* yang realistis dengan menyesuaikan durasi setiap kegiatan terhadap kapasitas narasumber maupun peserta.
- Mengadakan rapat teknis lebih awal untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak dan mengurangi hambatan saat pelaksanaan.

4. Penyesuaian Lokus Pemetaan Bahasa

- Melakukan koordinasi ulang dengan pihak terkait untuk mengonfirmasi titik lokus yang disetujui serta alasan perubahan.
- Menyusun strategi penyebaran titik baru di wilayah yang memang masih minim data agar tetap



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

sejalan dengan tujuan pemetaan.

- Mengoptimalkan sumber daya (SDM, waktu, anggaran) agar distribusi pengambilan data di titik baru tetap efektif.
- Membuat catatan evaluasi khusus terkait perubahan ini sebagai pembelajaran untuk perencanaan pemetaan di tahun berikutnya.

[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA

[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)

Progress/Kegiatan

Pada hari Senin—Rabu, tanggal 19—21 Mei 2025, telah dilaksanakan Fasilitasi Ke-BIPA-an: Peningkatan Kompetensi Pengajar BIPA berbasis SKKNI. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pengajar dalam menyampaikan materi ajar yang efektif, komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajar asing, serta memperkuat kapasitas profesional para pengajar BIPA agar mampu mengajar secara efektif dan sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Selanjutnya, pada tanggal 10—12 Juni 2025, dilaksanakan kegiatan Pengoptimalan Buku Saku BIPA sebagai Bahan Ajar Berbasis Kearifan Lokal di Destinasi Wisata Jawa Timur. Kegiatan ini difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan buku saku BIPA yang memuat unsur budaya dan kearifan lokal Jawa Timur, sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran kontekstual yang menarik dan relevan bagi pembelajar asing, khususnya di lingkungan destinasi wisata.

Kendala/Permasalahan

Pengelolaan anggaran untuk program BIPA menghadapi keterbatasan karena sebagian besar dana sudah terserap pada pos utama sehingga ruang gerak untuk pemanfaatan anggaran menjadi kurang leluasa. Kondisi ini berdampak pada fleksibilitas pelaksanaan kegiatan tambahan, seperti penyusunan dan pemanfaatan buku saku BIPA. Apabila kegiatan tersebut tetap dilaksanakan, maka harus ada penyesuaian pada program BIPA lainnya. Penyesuaian itu dapat berupa pengurangan porsi kegiatan tertentu atau perubahan metode pelaksanaan, misalnya dari luring menjadi daring, agar anggaran tetap mencukupi. Dengan demikian, keterbatasan alokasi anggaran ini menuntut adanya prioritas yang jelas dan strategi efisiensi agar seluruh target program tetap dapat terlaksana tanpa mengurangi kualitas hasil yang diharapkan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Prioritisasi Program

- Menentukan kegiatan BIPA yang paling mendesak dan berdampak langsung, seperti penyusunan buku saku yang bisa menjadi bahan ajar berkelanjutan.
- Mengurangi atau menunda program yang dampaknya tidak terlalu besar dalam jangka pendek agar anggaran dapat lebih fokus pada kebutuhan utama.

2. Efisiensi Metode Pelaksanaan

- Mengubah sebagian kegiatan dari luring menjadi daring untuk menghemat biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
- Memanfaatkan platform digital gratis atau berbiaya rendah untuk kegiatan pelatihan, pengajaran, maupun sosialisasi.

3. Optimalisasi Sumber Daya Internal

- Melibatkan tenaga ahli atau pengajar internal Balai Bahasa untuk menyusun konten buku saku BIPA



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

sehingga tidak terlalu banyak biaya tambahan.

- Menggunakan kembali materi yang sudah ada dengan sedikit modifikasi agar tetap relevan tanpa perlu biaya produksi besar.

4. Kolaborasi dan Dukungan Eksternal

- Menggandeng mitra, seperti perguruan tinggi, komunitas pengajar BIPA, atau lembaga kebudayaan, untuk mendukung penyusunan dan distribusi buku saku.
- Mencari peluang sponsor atau kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kepentingan pada pengembangan BIPA.

5. Manajemen Anggaran yang Fleksibel

- Membuat perencanaan keuangan yang lebih rinci, termasuk skenario alternatif jika terjadi pembatasan anggaran lebih lanjut.
- Menyisihkan sebagian kecil dana cadangan dari pos kegiatan lain yang kurang prioritas untuk mendukung kegiatan strategis BIPA.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Jawa Timur

[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Jawa Timur

Progress/Kegiatan

Pada triwulan kedua, Nilai IKPA BBP Jatim adalah 97.62 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Kualitas Perencanaan Anggaran

- Nilai: 100,00
- Bobot: 10
- Nilai Akhir: 10,00
- Perencanaan anggaran sudah sangat baik, tidak ada catatan deviasi atau kekurangan pada tahap perencanaan.

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

- Revisi DIPA: 100,00
- Deviasi Halaman III DIPA: 100
- Penyerapan Anggaran: 88.09
- Belanja Kontraktual: 100,00
- Penyelesaian Tagihan: 100,00
- Pengelolaan UP dan TUP: 100,00
- Nilai total aspek pelaksanaan: 97,62 (dengan bobot 65 → Nilai akhir $17,62 + 10 + 10 + 10 + 25 = 72,62$ dari aspek pelaksanaan)
- Hampir semua indikator pelaksanaan sempurna (100), kecuali deviasi Penyerapan Anggaran hanya 88,09. Artinya, terdapat ketidaksesuaian realisasi dengan target serapan anggaran pada triwulan II.

3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

- Capaian Output: 100,00
- Bobot: 25
- Nilai Akhir: 25,00
- Output kegiatan sesuai target, tidak ada kekurangan.

4. Rekapitulasi Nilai

- Nilai Total: 97,62
- Konversi Bobot: 100%



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- Dispensasi SPM (pengurang): 0,00
- Nilai Akhir: 97,62
- Secara keseluruhan, kinerja anggaran Balai Bahasa Jawa Timur sampai Juni berada pada kategori sangat baik (≥ 95).
- Kinerja anggaran sangat baik, dengan nilai akhir 97,62.
- Hampir semua indikator mendapat nilai 100, kecuali deviasi Penyerapan Anggaran (88,09) yang menurunkan nilai sedikit.
- Ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah sangat efektif, hanya perlu lebih cermat dalam kesesuaian realisasi dengan rencana DIPA agar tidak ada deviasi.

Kendala/Permasalahan

1. **Penyerapan Anggaran Belum Optimal:** nilai penyerapan anggaran hanya mencapai 88,09, lebih rendah dibanding indikator lain yang sempurna (100). Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan atau belum maksimalnya realisasi belanja pada triwulan II.
2. **Ketidaksesuaian Realisasi dengan Target Serapan:** meskipun perencanaan dan dokumen DIPA sudah sesuai (nilai 100), realisasi penyerapan tidak sepenuhnya sejalan dengan target. Kondisi ini bisa memengaruhi kredibilitas perencanaan dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. **Potensi Hambatan Administratif dan Teknis:** deviasi pada penyerapan bisa disebabkan oleh keterlambatan administrasi, kendala teknis pelaksanaan kegiatan, atau faktor eksternal (misalnya proses pengadaan, keterlambatan mitra/penyedia).
4. **Risiko Penumpukan Realisasi di Akhir Tahun:** jika deviasi penyerapan terus terjadi di triwulan berikutnya, ada risiko penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran yang bisa berdampak pada kualitas output kegiatan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Optimalisasi Penyerapan Anggaran

- Melakukan monitoring rutin penyerapan anggaran tiap bulan agar keterlambatan dapat segera terdeteksi.
- Menyusun timeline realisasi belanja yang lebih detail, disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan target triwulanan.
- Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan yang sudah memiliki kesiapan dokumen.
- Peningkatan Sinkronisasi Perencanaan dan Realisasi
- Melakukan review internal terhadap perencanaan DIPA untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan riil.
- Memperkuat koordinasi antara perencana, PPK, bendahara, dan pelaksana kegiatan agar target serapan lebih realistis dan dapat dicapai tepat waktu.

2. Percepatan Proses Administratif dan Teknis

- Memastikan dokumen pendukung pengadaan dan pembayaran disiapkan sejak awal.
- Mengantisipasi potensi hambatan dari pihak penyedia/mitra dengan menyusun jadwal komitmen kerja yang jelas.
- Memanfaatkan aplikasi monitoring keuangan untuk mempercepat proses verifikasi administrasi.

3. Pencegahan Penumpukan Belanja di Akhir Tahun

- Membagi target penyerapan secara proporsional tiap triwulan agar tidak terkonsentrasi di triwulan IV.
- Menetapkan rencana cadangan untuk kegiatan yang berisiko mundur dari jadwal.
- Melakukan evaluasi rutin dengan pimpinan guna mengantisipasi deviasi sejak awal.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Jawa Timur

[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Jawa Timur minimal A



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Progress/Kegiatan

Pada triwulan II, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dilaksanakan melalui beberapa kegiatan strategis. Kegiatan tersebut antara lain Rapat Reviu Renstra, yang bertujuan untuk menelaah kembali kesesuaian rencana strategis dengan perkembangan kondisi aktual serta memastikan arah kebijakan tetap selaras dengan sasaran kinerja. Selain itu, dilaksanakan pula Rapat Evaluasi Triwulan II sebagai forum untuk menilai capaian kinerja yang telah terealisasi hingga pertengahan tahun, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul serta langkah tindak lanjut yang perlu diambil.

Selanjutnya, dilakukan kegiatan Tindak Lanjut AKIP 2024 (Tinjut AKIP 2024) yang berfokus pada penyempurnaan dan pemutakhiran data kinerja, sehingga hasil evaluasi dapat mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas di tahun berikutnya. Selain itu, tim juga menyusun kelengkapan dokumen pendukung SAKIP, yang menjadi bagian penting dalam penyediaan data dukung untuk pelaporan kinerja.

Secara keseluruhan, implementasi SAKIP pada triwulan II telah berjalan sesuai rencana, dengan fokus pada penguatan evaluasi, perbaikan dokumen perencanaan, dan penyediaan data dukung yang lebih komprehensif.

Kendala/Permasalahan

Pada triwulan II, terdapat kendala dalam pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja. Draft Rencana Strategis (Renstra) Kementerian belum dipublikasikan secara resmi, sehingga satuan kerja belum dapat menyusun Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi, maupun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Ketiadaan dokumen Renstra sebagai acuan utama menyebabkan proses penyelarasan sasaran dan indikator kinerja tertunda, serta berimplikasi pada keterlambatan penyiapan dokumen turunan lainnya yang seharusnya mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Strategi/Tindak Lanjut

1. Koordinasi dengan Kementerian

- Melakukan komunikasi intensif dengan unit eselon I terkait agar memperoleh informasi perkembangan penyusunan Renstra Kementerian.
- Mengupayakan akses terhadap draft sementara Renstra (jika memungkinkan) sebagai bahan acuan awal.

2. Pemanfaatan Dokumen Tahun Sebelumnya

- Menggunakan Renstra periode sebelumnya sebagai pedoman sementara dalam menyusun rancangan PK, Rencana Aksi, dan SKP, dengan tetap menyesuaikan pada arah kebijakan terbaru yang sudah diinformasikan.
- Menyusun draft internal PK dan Rencana Aksi yang dapat segera disesuaikan ketika Renstra resmi diterbitkan.

3. Fokus pada Evaluasi dan Konsolidasi Data Kinerja

- Sambil menunggu Renstra resmi, dilakukan penguatan pada evaluasi kinerja periode sebelumnya untuk memastikan data dukung kinerja tetap lengkap dan siap digunakan.
- Mengidentifikasi capaian, hambatan, dan kebutuhan perbaikan yang dapat diintegrasikan dalam dokumen PK dan SKP ketika Renstra sudah tersedia.

4. Penyesuaian Jadwal Kerja

- Menyusun kembali timeline penyusunan PK, Rencana Aksi, dan SKP agar tetap dapat selesai tepat waktu setelah Renstra dipublikasikan.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- Menetapkan prioritas penyusunan dokumen yang bersifat mendesak dan menyiapkan format standar agar proses penyesuaian lebih cepat.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7569.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	Kegiatan	1	2	Rp493.837.000	Rp160.087.660	32.42
2	[DI.7569.QDC.001] Penutur bahasa terbina	Orang	140	215	Rp551.600.000	Rp149.209.669	27.05
3	[DI.7569.QDC.002] Penutur bahasa teruji	Orang	15208	20000	Rp527.650.000	Rp234.162.018	44.38
4	[DI.7569.QDC.003] Generasi muda terbina program literasi	Orang	0	200	Rp648.824.000	Rp210.866.759	32.50
5	[DI.7569.QMA.002] Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan	dokumen	0	0	Rp145.680.000	Rp66.493.838	45.64
6	[DI.7569.QMA.003] Produk Penerjemahan	dokumen	0	0	Rp2.383.958.000	Rp445.958.000	18.71
7	[DU.7566.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Kegiatan	0	0	Rp790.230.000	Rp4.715.700	0.60
8	[DU.7566.QDC.001] Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah	Orang	100	251	Rp1.302.058.000	Rp899.268.226	69.07
9	[DU.7566.QMA.002] Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra	dokumen	0	0	Rp102.090.000	Rp56.016.000	54.87
10	[DU.7567.BDB.001] Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	Lembaga	0	40	Rp138.747.000	Rp64.618.000	46.57



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
11	[DU.7567.BDB.002] Komunitas Penggerak Literasi Terbina	Lembaga	0	11	Rp120.000.000	Rp56.127.913	46.77
12	[DU.7568.QDB.001] Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	Lembaga	0	11	Rp128.109.000	Rp62.256.600	48.60
13	[WA.7613.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp1.815.000	18.15
14	[WA.7613.EBA.958] Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Dokumen	0	0	Rp250.630.000	Rp4.055.700	1.62
15	[WA.7613.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dokumen	0	0	Rp87.218.000	Rp16.952.197	19.44
16	[WA.7613.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp245.906.000	Rp33.488.905	13.62
17	[WA.7613.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp5.901.077.000	Rp3.697.073.991	62.65
18	[WA.7613.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	0	0	Rp203.622.000	Rp1.050.000	0.52
19	[WA.7613.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	0	1	Rp79.032.000	Rp3.100.000	3.92
Total Anggaran					Rp14.110.268.000	Rp6.167.316.176	43.71

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Kosakata tambahan diperoleh dengan memanfaatkan komunitas bahasa dan sastra di bawah binaan satuan kerja sebagai responden dengan kegiatan yang dilakukan dengan metode daring bersama pakar/penutur bahasa Madura dan Jawa.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pembelian kuota modem untuk membantu pelaksanaan UKBI Adaptif pada sekolah-sekolah yang masih belum memiliki jaringan internet yang memadai untuk pengujian dalam jumlah besar.
3. Kegiatan bimbingan teknis, peningkatan mutu, dan kegiatan sejenis lainnya pada tahun anggaran yang akan datang diusulkan dilaksanakan secara luring untuk meningkatkan kualitas capaian hasil dan presentase target PK.
4. Kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemertabatan bahasa negara di ruang publik dan tata naskah dinas tetap dilakukan dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia atau dilaksanakan secara daring dan segera dilakukan pendataan oleh tim KKLP Pembahu.
5. Karya-karya peserta pada kegiatan penerjemahan cerita anak dan pemberdayaan komunitas literasi



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

yang telah terkumpul untuk ditindaklanjuti dengan melibatkan Widyabasa untuk penyuntingan dan proses lainnya.

6. Kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan satuan kerja Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dengan pihak eksternal sudah melalui prosedur yang benar dan didokumentasikan melalui naskah kerja sama yang sesuai dan didokumentasikan melalui media sosial satuan kerja atau melalui media massa.
7. Pelaksanaan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan pengimbasan Revitalisasi Bahasa Daerah dilaksanakan secara luring dengan memperhatikan ketersediaan anggaran TW III dan memastikan penjangkauan data terimbas masuk ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur lebih cepat.
8. Pendataan jumlah peserta yang telah diimbaskan oleh para guru master wajib didata melalui aplikasi yang telah ditetapkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebelum melaksanakan pemantauan dan evaluasi di lapangan pada TW III.
9. Proses ilustrasi cerita anak yang perlu dipantau dan dipastikan segera untuk mengukur ketercapaian peserta didik dalam rangka pemanfaatan bahan cerita dan tim penerjemah telah memastikan semua tahapan telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang benar sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.
10. Pengumpulan data dukung penilaian SAKIP pada bulan Juli 2025 dilakukan oleh Tim Pelaporan dan didukung oleh semua pegawai Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.
11. Pemeliharaan gedung dan pengembangan laman segera ditindaklanjuti sehingga informasi dan pelayanan publik, baik internal dan eksternal dapat berjalan maksimal.
12. Pelaksanaan kegiatan wajib melalui proses, dari SK, rapat tim, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan melalui tahapan yang benar: ketua pelaksana, tim SPI, PPK, ada proses penyuntingan dan verifikasi dari Kasubag TU, dan terakhir KPA dan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 28 Agustus 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai Puji Retno Hardiningtyas
---	---



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE